



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 33.a /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf r dan huruf v Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dipandang perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran dan tata cara pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menunjuk Narasumber yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Dan Tata Cara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) dan kolom 4 (empat) sebagai Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Dan Tata Cara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 di wilayah Kecamatan sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dan memberikan informasi serta pemahaman tentang Tata Cara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 di masing-masing wilayah yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Segala yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 26 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Ketua,

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISAI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018
TANGGAL : 26 MARET 2018

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PEMUTAKHIRAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NARASUMBER	JABATAN
1.	TEMBILAHAN	1. H.SUHAIDI, Sag.MPd.I	Ketua KPU Kab. Inhil
		2. KHAIRUL ILHAM	Ketua PPK
2.	TEMBILAHAN HULU	1. H.SUHAIDI, Sag.MPd.I	Ketua KPU Kab. Inhil
		2. JAMHUR, Sag	Ketua PPK
3.	TEMPULING	1. H.SUHAIDI, Sag.MPd.I	Ketua KPU Kab. Inhil
		2. TABRANI	Ketua PPK
4.	KEMPAS	1. H.SUHAIDI, Sag.MPd.I	Ketua KPU Kab. Inhil
		2. ASRIADI	Ketua PPK
5.	SUNGAI BATANG	1. MUHAMMAD DONG, SP	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. SYAHRIL, Sag	Ketua PPK
6.	RETEH	1. MUHAMMAD DONG, SP	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. BUDIMAN, S.Kom	Anggota PPK Devisi Program dan Data
7.	KERITANG	1. MUHAMMAD DONG, SP	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. SURADAL, S.PKP	Ketua PPK
8.	KEMUNING	1. MUHAMMAD DONG, SP	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. KARESPAN, S.IP	Ketua PPK
9.	TANAH MERAH	1. NAHRAWI, Sag	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. M.FADILAH	Anggota PPK Devisi Program dan Data
10.	CONCONG	1. NAHRAWI, Sag	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. KARMAZUKI	Ketua PPK
11.	ENOK	1. NAHRAWI, Sag	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. SYAZULI, S.Pd.I	Ketua PPK
12.	KUALA INDRAGIRI	1. NAHRAWI, Sag	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. MUJITURAHMAN	Anggota PPK Devisi Program dan Data
13.	BATANG TUA	1. HJ.HASNI NOVRIANA, SE.MSI	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. RHICHIE RHICARDO, SE	Anggota PPK Devisi Program dan Data
14.	GAUNG	1. HJ.HASNI NOVRIANA, SE.MSI	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. PIDDINA HASSANAH	Anggota PPK Devisi Program dan Data
15.	GAS	1. HJ.HASNI NOVRIANA, SE.MSI	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. SAPARUDIN	Anggota PPK Devisi Program dan Data
16.	MANDAH	1. HJ.HASNI NOVRIANA, SE.MSI	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. AFRIZAL	Anggota PPK Devisi Program dan Data
17.	PELANGIRAN	1. Drs.JONI SUHAIDI	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. ZULKIFLI R, SH	Ketua PPK
18.	KATEMAN	1. Drs.JONI SUHAIDI	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. MUHAMMAD ASHARI, S.Pd.I	Ketua PPK
19.	TELUK BELENGKONG	1. Drs.JONI SUHAIDI	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. EKO SULIANTO, SE	Ketua PPK
20.	PULAU BURUNG	1. Drs.JONI SUHAIDI	KOMISIONER KPU Kab. Inhil
		2. MUADI, SE, MM	Ketua PPK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Ketua,

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

